

Optimalisasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Riau: Analisis Kebijakan Diferensiasi Berbasis Keunggulan Daerah

Muhammad Hidayat Syah *¹

¹Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Provinsi Riau

*e-mail: yachyat03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Provinsi Riau sebagai instrumen pembiayaan pendidikan berbasis keunggulan wilayah. Fokus utama kajian adalah mengidentifikasi tingkat irisan antara program BOSDA dengan BOS Nasional (BOSNAS) serta merumuskan alternatif kebijakan yang mampu mengoptimalkan peran BOSDA dalam memperkuat keterkaitan pendidikan dengan sektor unggulan daerah, yaitu migas dan perkebunan kelapa sawit. Metode yang digunakan adalah pendekatan analisis kebijakan multi-metodologi. Analisis konten dilakukan terhadap dokumen regulasi dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) di 24 sekolah sampel, disertai gap analysis untuk memetakan perbedaan antara kondisi aktual dan ideal, serta analisis kebijakan komparatif untuk membandingkan struktur BOSDA dan BOSNAS. Selanjutnya, metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) digunakan untuk menetapkan prioritas masalah, sementara evaluasi alternatif kebijakan dilakukan dengan kerangka Bardach's Eightfold Path untuk mengukur kelayakan teknis, finansial, politik, dan administratif. Hasil analisis menunjukkan bahwa 86,8% komponen BOSDA beririsan dengan BOSNAS, dengan potensi dana tidak optimal sebesar Rp336 miliar per tahun atau Rp1,68 triliun selama lima tahun. Temuan ini menegaskan bahwa permasalahan BOSDA bersifat struktural akibat ketiadaan kerangka diferensiasi dalam regulasi daerah. Evaluasi kebijakan menghasilkan tiga alternatif dengan pendekatan berbeda, di mana Alternatif III (Revisi Partisipatif) dinilai paling optimal dengan skor 4,20 karena mampu menyeimbangkan ambisi transformasi dengan kelayakan implementasi. Kesimpulannya, BOSDA di Provinsi Riau perlu segera direformulasi dengan kerangka diferensiasi berbasis keunggulan daerah. Intervensi kebijakan yang partisipatif dan bertahap diyakini mampu mengurangi irisan program hingga 30% serta menjadikan BOSDA instrumen strategis dalam pembangunan SDM unggul yang relevan dengan kebutuhan industri migas dan perkebunan kelapa sawit.

Kata kunci: BOSDA, Diferensiasi progra, Kebijakan pendidikan, Provinsi Riau, Sumber daya manusia

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the Regional School Operational Assistance (BOSDA) in Riau Province as an education financing instrument based on regional competitive advantages. The main focus of this research is to identify the level of overlap between BOSDA and the National School Operational Assistance (BOSNAS), as well as to formulate policy alternatives that can optimize the role of BOSDA in strengthening the linkage between education and key regional sectors, namely oil and gas and oil palm plantations. The research employed a multi-method policy analysis approach. Content analysis was conducted on regulatory documents and School Activity and Budget Plans (RKAS) from 24 sampled schools, accompanied by gap analysis to map the discrepancies between current conditions and the expected ideal, and comparative policy analysis to assess the structural differences between BOSDA and BOSNAS. Furthermore, the USG method (Urgency, Seriousness, Growth) was applied to determine problem priorities, while policy alternatives were evaluated using Bardach's Eightfold Path to measure technical, financial, political, and administrative feasibility. The findings reveal that 86.8% of BOSDA components overlap with BOSNAS, resulting in unoptimized funds of approximately IDR 336 billion per year, or IDR 1.68 trillion over five years. This confirms that BOSDA's problems are structural, rooted in the absence of a clear differentiation framework within regional regulations. The policy evaluation generated three alternatives, among which Alternative III (Participatory Revision) was deemed the most optimal, scoring 4.20 for its ability to balance transformative ambition with implementation feasibility. In conclusion, BOSDA in Riau Province urgently requires reformulation with a differentiation framework aligned with regional advantages. A participatory and gradual policy intervention is expected to reduce program overlap to 30% and transform BOSDA into a strategic instrument for developing high-quality human resources relevant to the needs of the oil and gas as well as palm oil industries.

Keywords: BOSDA, program differentiation, education policy, Riau Province, human resources

PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah dengan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama melalui sektor migas, perkebunan kelapa sawit, dan sektor industri berbasis sumber daya alam. Namun, keberhasilan ekonomi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya pada sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Riau sejak tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah yang ditujukan untuk memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan. Selama periode 2020–2024, alokasi dana BOSDA mencapai Rp1,936 triliun yang disalurkan ke 764 sekolah dan 256 ribu siswa setiap tahunnya. Skema ini dimaksudkan sebagai pelengkap kebijakan nasional melalui BOS Reguler (BOSNAS) sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan riil di daerah yang sering kali tidak sepenuhnya terjangkau oleh kebijakan pusat. Konsistensi komitmen ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Alokasi BOSDA Provinsi Riau Tahun 2020-2024

| Tahun | Total Sekolah | Total Siswa | Total Dana (Rp) | Rata-rata per Sekolah (Rp) |
|-----------|---------------|-------------|-------------------|----------------------------|
| 2020 | 779 | 253.059 | 330.206.800.000 | 424.014.000 |
| 2021 | 778 | 258.944 | 338.725.000.000 | 435.297.000 |
| 2022 | 786 | 267.287 | 350.526.500.000 | 445.826.000 |
| 2023 | 791 | 270.508 | 356.029.500.000 | 450.227.000 |
| 2024 | 687 | 273.888 | 360.597.800.000 | 524.890.000 |
| Total | 3.821 | 1.281.486 | 1.936.085.600.000 | 497.050.000 |
| Rata-Rata | 764 | 256.297 | 387.217.120.000 | 497.050.000 |

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Riau, 2025

Dengan rata-rata anggaran Rp387 miliar per tahun, BOSDA telah menjadi instrumen penting dalam pembiayaan pendidikan daerah. Namun, Provinsi Riau memiliki karakteristik yang unik. Sebagai salah satu penghasil minyak, gas (migas), dan kelapa sawit terbesar di Indonesia serta memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) peringkat keenam tertinggi nasional (GoRiau, 2024), Riau membutuhkan sumber daya manusia yang sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor strategisnya. Dalam konteks ini, BOSDA seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS), melainkan diarahkan sebagai instrumen strategis yang memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri lokal. Dukungan pendanaan daerah harus mampu mendorong pengembangan SDM berbasis keunggulan wilayah untuk memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi BOSDA masih menghadapi sejumlah persoalan yang cukup mendasar. Salah satu permasalahan utama adalah tingginya irisan program BOSDA dengan BOS Nasional. Terdapat duplikasi yang signifikan dalam komponen pembiayaan, di mana sebagian besar alokasi BOSDA justru digunakan untuk kegiatan yang sebenarnya sudah dibiayai oleh BOSNAS. Kondisi ini menunjukkan lemahnya diferensiasi program BOSDA sehingga berpotensi mengurangi nilai tambah investasi pendidikan daerah. Akibatnya, alokasi sumber daya menjadi kurang efisien dan inovasi program pendidikan yang seharusnya mencerminkan kebutuhan khas daerah tidak berkembang secara optimal (Hasil Analisis RKAS 24 sekolah, 2024).

Selain persoalan tumpang tindih program, tantangan lain yang cukup serius adalah rendahnya tingkat penyerapan lulusan SMK ke sektor-sektor unggulan daerah. Berdasarkan data, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK di Provinsi Riau mencapai 8,12% pada tahun 2024, meningkat 1,85 persen poin dari 6,27% pada Februari 2024. Kondisi ini sangat kontradiktif

dengan potensi ekonomi Riau yang ditopang lebih dari 200 perusahaan di sektor migas dan perkebunan sawit. Tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMK, yang justru lebih tinggi dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lain, menegaskan adanya mismatch antara kompetensi lulusan yang dihasilkan sistem pendidikan dengan kebutuhan riil industri unggulan daerah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa peran BOSDA belum maksimal dalam menjembatani keterkaitan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja (Berita Resmi Statistik BPS Riau, 2025).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat kepuasan dunia industri terhadap budaya kerja lulusan SMK. Evaluasi yang dilakukan terhadap perusahaan pengguna tenaga kerja menunjukkan bahwa sekitar 79,86% lulusan SMK pada tahun 2024 belum memenuhi ekspektasi dunia kerja dalam hal etos kerja, kedisiplinan, serta budaya kerja yang sesuai dengan standar industri (Rapor Pendidikan Provinsi Riau, 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa kendala pembangunan SDM di Riau tidak hanya terkait dengan hard skills atau kompetensi teknis, tetapi juga mencakup aspek soft skills yang menentukan kesiapan lulusan untuk bersaing di pasar kerja.

Ketiga masalah tersebut saling berkaitan erat dan secara simultan berkontribusi terhadap belum tercapainya visi pembangunan SDM berbasis keunggulan wilayah di Provinsi Riau. Tumpang tindih program BOSDA dengan BOSNAS menyebabkan pemborosan anggaran dan melemahkan fokus kebijakan lokal. Rendahnya serapan lulusan SMK ke sektor unggulan mengindikasikan ketidaksesuaian arah pendidikan dengan kebutuhan industri daerah. Sementara itu, rendahnya kualitas budaya kerja lulusan semakin memperburuk kesenjangan antara output pendidikan dengan ekspektasi dunia usaha. Dengan kompleksitas masalah yang saling terkait ini, diperlukan analisis prioritas menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) agar pemerintah daerah dapat menentukan masalah mana yang harus ditangani lebih dahulu secara strategis dan berkesinambungan.

METODE

Studi ini menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) sebagai teknik analisis prioritas masalah dalam konteks kebijakan publik dan perencanaan strategis. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Kepner dan Tregoe (1965) dalam *The Rational Manager* sebagai pendekatan sistematis untuk pemecahan masalah, kemudian diadaptasi dalam kajian kebijakan publik (Bryson, 2018; Dunn, 2018). Penilaian USG dilakukan dengan tiga kriteria, yaitu tingkat urgensi (urgency), keseriusan dampak (seriousness), dan potensi perkembangan masalah (growth), masing-masing menggunakan skala Likert 1–5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa masalah “tingginya irisan program BOSDA dengan BOS Nasional” memperoleh skor tertinggi (5 dan 4), sehingga diprioritaskan sebagai isu strategis utama dibandingkan masalah rendahnya absorpsi lulusan SMK ke sektor unggulan (4 dan 3) dan rendahnya kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK (3,4,dan 5).

Untuk menjaga objektivitas, penilaian dilakukan melalui diskusi partisipatif dengan lima pemangku kepentingan utama, yaitu Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Bidang SMA, Kepala Bidang SMK, Ketua Tim BOSDA, dan Ketua Tim Perencanaan Program Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Keterlibatan aktor-aktor kunci ini memungkinkan evaluasi yang komprehensif dan berimbang terhadap urgensi, keseriusan, serta potensi pertumbuhan setiap masalah. Analisis lanjutan mengidentifikasi bahwa akar persoalan utama bukan terletak pada sekolah, melainkan pada aspek regulasi, khususnya ketiadaan framework diferensiasi yang jelas dalam Peraturan Gubernur Riau No. 2 Tahun 2024 serta minimnya pedoman teknis implementasi bagi sekolah. Hal

ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih struktural agar BOSDA tidak hanya menjadi duplikasi BOS Nasional, melainkan instrumen inovatif berbasis keunggulan daerah.

Sejalan dengan temuan tersebut, tujuan kajian ini adalah merumuskan rekomendasi revisi Pergub Riau No. 2 Tahun 2024 guna membangun kerangka diferensiasi BOSDA yang terstruktur dan aplikatif. Target yang ditetapkan adalah menurunkan tingkat irisan anggaran BOSDA-BOSNAS dari 86,8% menjadi minimal 30%, sehingga Rp336 miliar per tahun dapat dialokasikan untuk program-program unggulan yang spesifik dengan karakteristik Provinsi Riau. Dengan demikian, BOSDA diharapkan bertransformasi menjadi instrumen inovasi pendidikan daerah yang benar-benar melengkapi BOS Nasional dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), sekaligus memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan industri strategis daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teoretis dan Regulasi

Analisis kebijakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan multi-metodologi untuk memperoleh hasil yang komprehensif dan berbasis evidensi. Content Analysis (Krippendorff, 2018) digunakan untuk menelaah dokumen regulasi dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) secara sistematis guna mengidentifikasi pola, tema, dan kesenjangan kebijakan. Selanjutnya, Gap Analysis (Dunn, 2003) diterapkan untuk memetakan perbedaan antara kondisi aktual dan ideal implementasi BOSDA, khususnya dalam hal diferensiasi program terhadap BOS Nasional. Sementara itu, Analisis Kebijakan Komparatif (Cairney, 2019) dimanfaatkan untuk membandingkan struktur, komponen, dan implementasi BOSDA dengan BOS Nasional, sehingga peluang inovasi sesuai karakteristik daerah dapat teridentifikasi secara lebih jelas.

Kerangka metodologis tersebut berjalan beriringan dengan kerangka regulatif yang menjadi dasar implementasi BOSDA. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan provinsi dalam mengelola pendidikan menengah, termasuk kebijakan pembiayaan. PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menetapkan standar minimal yang harus dicapai, namun BOSDA diharapkan mampu melampaui standar tersebut dengan mengembangkan keunggulan berbasis lokal. Selanjutnya, Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS menjadi baseline untuk mengukur tingkat irisan program, sekaligus membuka ruang bagi diferensiasi BOSDA pada aspek-aspek spesifik, seperti penguatan kompetensi vokasional, kurikulum berbasis industri unggulan, hingga peningkatan kapasitas digital sekolah di daerah terpencil.

Temuan Empiris Tingkat Irisan Program BOSDA dengan BOS Nasional

Analisis terhadap dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dari 24 sekolah sampel yang terdiri atas 12 SMA dan 12 SMK mewakili 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau menunjukkan adanya persoalan sistemik dalam penggunaan dana BOSDA. Pemilihan sekolah dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan variasi wilayah (perkotaan, pesisir, pedalaman) dan ketersediaan dokumen tahun 2024 yang lengkap. Framework analisis menggunakan 12 komponen pembiayaan BOS Nasional sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rata-rata 86,8% komponen penggunaan dana BOSDA beririsan dengan BOS Nasional, dengan variasi tingkat irisan antara 66,7% hingga 100%. Dari 24 sekolah yang dianalisis, sebanyak 13 sekolah (54,2%) memiliki irisan 100%, tujuh sekolah (29,2%) berada pada kisaran 75–91,7%, dan hanya empat sekolah (16,7%) yang mencatat irisan

di bawah 75%. Data ini menegaskan bahwa mayoritas sekolah masih menggunakan pola alokasi BOSDA yang hampir identik dengan BOSNAS, sehingga fungsi diferensiasi BOSDA tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dari sisi finansial, tingkat irisan sebesar 86,8% terhadap alokasi BOSDA rata-rata Rp387 miliar per tahun berarti terdapat potensi Rp336 miliar per tahun yang tidak memberikan nilai tambah diferensiatif. Jika dihitung selama lima tahun implementasi (2020–2024), nilai potensi yang hilang mencapai Rp1,68 triliun. Angka ini menggambarkan peluang besar yang terlewatkan untuk mengembangkan program-program pendidikan inovatif berbasis keunggulan daerah. Apabila dana tersebut dialokasikan secara tepat, Provinsi Riau memiliki kapasitas untuk menciptakan *competitive advantage* dalam pengembangan sumber daya manusia yang lebih relevan dengan kebutuhan sektor strategis migas, perkebunan kelapa sawit, dan industri daerah lainnya.

Analisis Gap Regulasi Sistemik

Hasil perbandingan regulasi menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang signifikan antara BOSDA Provinsi Riau dan BOS Nasional. **Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022** telah menetapkan 12 komponen penggunaan dana BOS dengan rincian sub-komponen, indikator terukur, serta mekanisme koordinasi lintas-sektor. Sebaliknya, **Pergub Riau No. 2 Tahun 2024** hanya menyebut secara umum bahwa penggunaan BOSDA harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan tanpa menyertakan kerangka operasional maupun mekanisme diferensiasi. Tabel analisis memperlihatkan bahwa hampir semua aspek regulasi—mulai dari komponen spesifik, detail operasional, hingga target terukur—tidak diatur secara memadai dalam Pergub, sehingga sekolah tidak memiliki panduan jelas untuk mengembangkan program yang berbeda dari BOS Nasional.

Masalah regulatif ini semakin diperburuk di tingkat implementasi. Analisis terhadap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau No. 394/2024 menunjukkan bahwa dari 12 komponen yang ditetapkan, 11 di antaranya menggunakan nomenklatur dan substansi yang hampir identik dengan BOS Nasional. Akibatnya, sekolah cenderung menyalin template RKAS BOSNAS karena dianggap lebih aman dan familiar. Keterbatasan kapasitas perencanaan sekolah, ketiadaan panduan program unggulan daerah, serta minimnya sosialisasi semakin memperkuat pola ketergantungan ini. Kombinasi faktor-faktor tersebut menciptakan siklus duplikasi yang sistemik, yang pada akhirnya menjelaskan tingginya tingkat irisan program BOSDA dengan BOS Nasional di Provinsi Riau.

Analisis Kontekstual Potensi Diferensiasi BOSDA Provinsi Riau

Provinsi Riau memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang unik, yang sekaligus membuka peluang besar untuk mengembangkan komponen diferensiasi BOSDA. Sebagai penghasil minyak, gas, dan kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan PDRB peringkat keenam nasional, Riau memiliki ekosistem industri yang kuat untuk dikembangkan sebagai basis kemitraan strategis antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Lebih dari 200 perusahaan migas dan perkebunan beroperasi di provinsi ini, yang berpotensi menjadi mitra sekolah dalam menyediakan program magang, sertifikasi kompetensi, serta jalur penyerapan tenaga kerja. Sektor migas dengan teknologi tinggi menuntut SDM yang terampil dalam teknologi digital, instrumentasi, dan manajemen operasi, sedangkan sektor perkebunan kelapa sawit membutuhkan tenaga kerja yang memahami rantai pasok hulu-hilir, aspek keberlanjutan, serta inovasi produk turunan.

Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kompetensi lulusan sekolah menengah, khususnya SMK, dengan kebutuhan industri unggulan daerah. Data BPS (2025) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK di Riau mencapai 8,12% pada tahun 2024, naik 1,85 persen poin dari periode sebelumnya. Tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan vokasi ini sangat kontradiktif dengan besarnya potensi industri daerah. Evaluasi dunia industri juga menyoroti kelemahan soft skills, seperti etos kerja, kedisiplinan, dan budaya kerja yang belum memenuhi standar industri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa BOSDA belum optimal dalam memfasilitasi link and match antara sekolah dan industri, baik dalam aspek kompetensi teknis maupun pembentukan karakter kerja.

Dalam konteks tersebut, BOSDA memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kesenjangan pendidikan dengan kebutuhan riil industri. Melalui kebijakan diferensiasi, BOSDA dapat diarahkan untuk mendukung program-program yang langsung menysasar kebutuhan lokal, seperti beasiswa talenta daerah, pelatihan berbasis kompetensi industri, serta pengembangan budaya kerja sesuai standar perusahaan multinasional. Upaya ini bukan hanya meningkatkan kualitas lulusan, tetapi juga memperkuat daya saing SDM Riau dalam pasar tenaga kerja.

Selain aspek industri, karakteristik geografis Riau yang luas dan mencakup wilayah perkotaan, pesisir, serta pedalaman juga memerlukan inovasi penyelenggaraan pendidikan. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan adalah pengembangan platform pembelajaran digital berbasis konten lokal, yang sekaligus memperluas akses pendidikan dan memperkenalkan siswa pada potensi ekonomi daerah. Kemitraan dengan perusahaan lokal dapat diwujudkan dalam bentuk program magang terstruktur dengan sertifikasi, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, pembangunan laboratorium atau workshop dengan standar industri, serta mentoring oleh praktisi.

Dengan besarnya potensi ekonomi dan kebutuhan strategis tersebut, BOSDA harus diarahkan bukan sekadar sebagai tambahan pembiayaan operasional, melainkan sebagai katalis pembangunan SDM unggul. Program beasiswa talenta daerah, misalnya, dapat menjadi instrumen untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan putra-putri terbaik Riau agar tidak mengalami *brain drain* ke daerah lain. Dengan strategi diferensiasi yang tepat, BOSDA berpotensi memperkuat posisi Riau sebagai pusat pengembangan SDM yang selaras dengan sektor unggulannya, sekaligus mendorong daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Implikasi Kebijakan

Tingkat irisan program BOSDA dengan BOS Nasional yang mencapai 86,8% menimbulkan dampak finansial berupa inefisiensi penggunaan APBD dalam skala besar. Dari total alokasi Rp387 miliar per tahun, sekitar Rp336 miliar tidak memberikan nilai tambah diferensiatif. Jika dihitung selama lima tahun, nilai potensi yang hilang mencapai Rp1,68 triliun sebuah opportunity cost yang seharusnya dapat dialokasikan untuk program inovasi pendidikan dengan efek berganda terhadap pengembangan SDM dan ekonomi daerah.

Dari sisi strategis, lemahnya keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan industri membuat Riau berisiko kehilangan momentum dalam memanfaatkan bonus demografis dan keunggulan ekonominya. Ketergantungan pada pola nasional tanpa diferensiasi lokal menyebabkan sistem pendidikan tidak mampu menjawab kebutuhan sektor unggulan, yang berpotensi memicu brain drain talenta terbaik ke luar daerah serta kesulitan industri lokal dalam memperoleh SDM berkualitas yang memahami karakteristik sektor migas dan perkebunan sawit.

Kondisi ini menegaskan adanya urgensi intervensi kebijakan yang bersifat struktural, bukan sekadar teknis-operasional. Reformulasi regulasi BOSDA menjadi kebutuhan mendesak

karena setiap tahun keterlambatan berarti hilangnya peluang besar bagi pengembangan pendidikan berbasis keunggulan daerah. Framework diferensiasi yang terstruktur harus segera dirumuskan agar BOSDA dapat berfungsi sebagai instrumen strategis pembangunan SDM. Dengan demikian, solusi yang diperlukan adalah kebijakan komprehensif mencakup regulasi, implementasi, dan mekanisme monitoring yang terintegrasi.

Kerangka Perumusan Alternatif Kebijakan

Berdasarkan analisis akar masalah, tingginya irisan program BOSDA dengan BOS Nasional yang mencapai 86,8% disebabkan ketiadaan kerangka diferensiasi dalam **Pergub Riau No. 2/2024**. Kondisi ini menimbulkan *opportunity cost* sebesar Rp1,68 triliun dalam lima tahun, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk inovasi pendidikan. Untuk menjawab persoalan ini, dirumuskan tiga alternatif kebijakan dengan pendekatan berbeda dalam cakupan, kompleksitas, dan dampak.

Alternatif I adalah revisi minimal dilakukan dengan merevisi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tanpa mengubah Pergub. Fokus diarahkan pada dua program baru, yaitu kemitraan industri migas-perkebunan dan beasiswa talenta daerah dengan alokasi diferensiasi 40% (Rp155 miliar per tahun). Target penurunan tingkat irisan adalah hingga 60% dalam enam bulan. Kelebihan alternatif ini terletak pada kecepatan dan rendahnya resistensi, namun kelemahannya tidak menyentuh akar masalah regulasi sehingga dampak transformatif terbatas.

Alternatif II adalah revisi komprehensif menargetkan perubahan fundamental dengan merevisi total Pergub dan memperkenalkan kerangka diferensiasi penuh. Tiga komponen utama adalah kemitraan industri (Rp135,5 miliar), beasiswa talenta (Rp94,9 miliar), dan digitalisasi pembelajaran (Rp40,7 miliar), dengan alokasi 70% dari total BOSDA (Rp271 miliar). Targetnya menurunkan irisan hingga 30% dalam 12 bulan, dengan outcome berupa keterpaduan pendidikan-industri dan peningkatan serapan lulusan SMK. Alternatif ini paling ambisius, tetapi juga berisiko tinggi karena memerlukan koordinasi lintas sektor yang kompleks serta kapasitas SDM yang kuat.

Alternatif III adalah revisi partisipatif memadukan ambisi transformatif dengan pendekatan bertahap. Revisi Pergub dilakukan, namun implementasi dibagi dalam tiga fase selama 18 bulan: perancangan dan konsultasi, pelaksanaan program prioritas, serta penyempurnaan dengan digitalisasi. Pendekatan partisipatif melibatkan stakeholder sejak awal, sehingga resistensi dapat diminimalkan dan pembelajaran diperoleh di setiap fase. Kelemahannya adalah waktu implementasi lebih panjang dan membutuhkan konsistensi kepemimpinan.

Dengan demikian, ketiga alternatif menawarkan pilihan antara kecepatan, kedalaman perubahan, dan keberlanjutan implementasi. Keseluruhannya diarahkan pada tujuan utama menurunkan irisan BOSDA-BOSNAS hingga minimal 30% dan mentransformasikan BOSDA menjadi instrumen strategis pengembangan SDM berbasis keunggulan daerah.

Evaluasi Alternatif dengan Metodologi Bardach

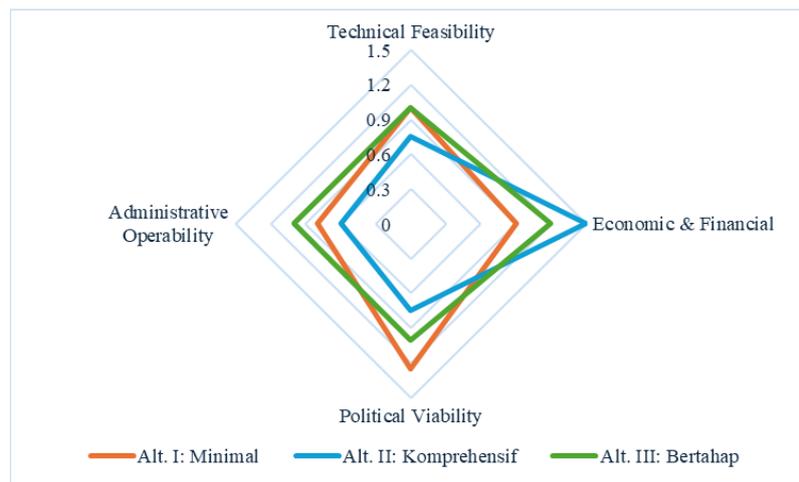
Evaluasi alternatif kebijakan dilakukan dengan kerangka Bardach yang menekankan kelayakan implementasi di lapangan. Empat kriteria digunakan dengan bobot berbeda sesuai konteks Provinsi Riau. Kelayakan Ekonomi dan Finansial diberi bobot tertinggi (30%) karena optimalisasi APBD dan dampak ekonomi menjadi faktor kunci. Kelayakan Teknis dan Kelayakan Politik masing-masing berbobot 25%, mengingat keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur/SDM serta dukungan politik dan penerimaan stakeholder. Sementara itu, Operabilitas Administratif mendapat bobot 20% sebagai penentu keberlanjutan program melalui efektivitas birokrasi.

Kelayakan teknis menilai kesiapan infrastruktur, regulasi, dan kapasitas SDM; kelayakan ekonomi mengukur efisiensi, *cost-benefit ratio*, dan potensi *multiplier effect*; kelayakan politik menilai dukungan pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat; sedangkan operabilitas administratif menekankan kemudahan koordinasi lintas-SKPD serta kesesuaian dengan struktur organisasi yang ada. Kombinasi keempat kriteria ini menjadi dasar objektif untuk menentukan alternatif kebijakan BOSDA yang paling realistis dan berdampak optimal.

Tabel 2. Evaluasi Metodologi Bardach terhadap Tiga Alternatif Kebijakan

| Kriteria | Bobot | Alt. I: Minimal | Alt. II: Komprehensif | Alt. III: Partisipatif |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <i>Technical Feasibility</i> | 25% | $4 \times 0.25 = 1.00$ | $3 \times 0.25 = 0.75$ | $4 \times 0.25 = 1.00$ |
| <i>Economic & Financial</i> | 30% | $3 \times 0.30 = 0.90$ | $5 \times 0.30 = 1.50$ | $4 \times 0.30 = 1.20$ |
| <i>Political Viability</i> | 25% | $5 \times 0.25 = 1.25$ | $3 \times 0.25 = 0.75$ | $4 \times 0.25 = 1.00$ |
| <i>Administrative Operability</i> | 20% | $4 \times 0.20 = 0.80$ | $3 \times 0.20 = 0.60$ | $5 \times 0.20 = 1.00$ |
| TOTAL SKOR | 100% | 3.95 | 3.6 | 4.2 |
| RANKING | | 2 | 3 | 1 |

Untuk mempermudah perbandingan profil kekuatan dan kelemahan dari setiap alternatif, data skor pada Tabel 3.1 divisualisasikan dalam bentuk *spider chart* di bawah ini. Grafik ini menyajikan perbandingan langsung antara ketiga alternatif berdasarkan empat kriteria evaluasi. Secara visual, alternatif dengan cakupan area terluas menunjukkan profil yang paling seimbang dan unggul.



Gambar 1. Analisis Komparatif Alternatif Kebijakan Menggunakan Kerangka Bardach

Berdasarkan hasil analisis di atas, Alternatif I (Skor 3.95) menunjukkan profil yang sangat baik dalam aspek *political viability* (1.25) dan *technical feasibility* (1.00), mencerminkan kemudahan implementasi dan penerimaan yang tinggi dari stakeholder. Namun skor yang rendah pada *economic and financial feasibility* (0.90) menunjukkan bahwa dampak transformatif yang dihasilkan terbatas. Alternatif ini merupakan pilihan yang aman namun tidak memberikan perubahan fundamental yang dibutuhkan untuk mengatasi akar masalah.

Alternatif II (Skor 3.60) memperoleh skor tertinggi pada *economic and financial feasibility* (1.50), menunjukkan potensi dampak ekonomi yang maksimal. Namun skor rendah pada *political viability* (0.75) dan *administrative operability* (0.60) mengindikasikan risiko kegagalan implementasi yang tinggi. Meskipun ideal secara konseptual, alternatif ini menghadapi tantangan besar dalam aspek implementasi praktis.

Alternatif III (Skor 4.20) muncul sebagai pilihan optimal dengan profil yang paling seimbang. Skor yang baik pada *economic and financial feasibility* (1.20) menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan, sementara skor tertinggi pada *administrative operability* (1.00) mencerminkan kelayakan implementasi yang baik. *Political viability* dan *technical feasibility* yang solid (masing-

masing 1.00) menunjukkan bahwa alternatif ini dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh stakeholder terkait.

KESIMPULAN

Analisis terhadap implementasi BOSDA Provinsi Riau 2020-2024 menunjukkan tingkat irisan dengan BOS Nasional yang sangat tinggi (86,8%), sehingga Rp336 miliar per tahun atau Rp1,68 triliun dalam lima tahun tidak memberikan nilai tambah diferensiatif. Akar masalah terletak pada ketiadaan framework diferensiasi dalam Pergub Riau No. 2/2024 serta minimnya pedoman implementasi bagi sekolah.

Melalui analisis alternatif kebijakan dengan metode Bardach, Alternatif III: Revisi Partisipatif dengan Implementasi Bertahap dipilih sebagai solusi paling optimal dengan skor tertinggi (4,20). Pendekatan ini dinilai mampu menyeimbangkan ambisi transformatif dengan realitas implementasi birokrasi, karena setiap fase didesain partisipatif, adaptif, dan berbasis konsensus.

Target utama adalah menurunkan tingkat irisan dari 86,8% menjadi 30% dalam 18 bulan melalui penguatan tiga komponen diferensiasi: kemitraan industri migas-perkebunan, beasiswa talenta daerah, dan digitalisasi pembelajaran kontekstual.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis, direkomendasikan reformulasi BOSDA Provinsi Riau melalui empat pilar kebijakan yang saling terkait. Pertama, Gubernur Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi Riau perlu melakukan revisi Pergub Riau No. 2/2024 dengan pendekatan partisipatif untuk menciptakan kerangka diferensiasi yang jelas, spesifik, dan selaras dengan peta jalan ekonomi daerah. Proses revisi harus melibatkan konsultasi publik serta koordinasi lintas-SKPD guna menjamin legitimasi dan keterpaduan kebijakan.

Kedua, implementasi framework tiga komponen diferensiasi yang menjadi pembeda BOSDA dari BOSNAS, yakni: (1) kemitraan industri migas-perkebunan melalui magang, sertifikasi kompetensi, dan pelatihan guru berbasis praktisi; (2) beasiswa talenta daerah untuk 500 siswa terbaik per tahun dengan mekanisme pengabdian kembali; dan (3) digitalisasi pembelajaran kontekstual berupa platform e-learning berbasis industri lokal dan laboratorium virtual.

Ketiga, penguatan kapasitas sekolah dalam perencanaan anggaran kontekstual, dengan menyediakan pelatihan, pendampingan, serta panduan penyusunan RKAS tematik. Upaya ini akan memastikan sekolah mampu memanfaatkan BOSDA secara inovatif dan menekan irisan dengan BOSNAS.

Keempat, implementasi bertahap selama 18 bulan melalui tiga fase: (1) konsultasi dan harmonisasi regulasi (0-6 bulan); (2) peluncuran program prioritas kemitraan industri dan beasiswa talenta (6-12 bulan); dan (3) implementasi penuh digitalisasi serta evaluasi kebijakan (12-18 bulan).

Dengan strategi partisipatif dan bertahap ini, BOSDA dapat ditransformasikan dari sekadar pelengkap BOSNAS menjadi instrumen inovasi pendidikan yang mempercepat lahirnya SDM unggul sesuai kebutuhan sektor migas dan perkebunan sawit. Keberhasilan reformulasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing Riau, tetapi juga berpotensi menjadi model nasional dalam optimalisasi dana pendidikan berbasis keunggulan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). *A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving* (6th ed.). CQ Press.
- Berita Resmi Statistik BPS Riau. (2025). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). Wiley.
- Cairney, P. (2019). *Understanding public policy: Theories and issues* (2nd ed.). Red Globe Press.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- GoRiau. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau peringkat ke-6 nasional*. GoRiau.com.
- Kepner, C. H., & Tregoe, B. B. (1965). *The rational manager: A systematic approach to problem solving and decision making*. McGraw-Hill.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rapor Pendidikan Provinsi Riau. (2024). *Evaluasi capaian pendidikan dan kepuasan dunia kerja terhadap lulusan SMK*. Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).